

# **UPAYA ARAB SAUDI TERHADAP ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK IRAN DAN ARAB SAUDI TAHUN 2013-2018**

**Emil Hikmawan**

**Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.**

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia  
*emilhikmawan@gmail.com*  
*gustrieni.putri@uii.ac.id*

## **Abstract**

*Middle East region can be realized as region which is susceptible with conflict. The conflict in Middle East which is increasingly needed constructive and sustainable effort in order to reduce a conflict potential. The problem that concern of international community is conflict involving Iran and Saudi Arabia after death penalty to Syekh Nimr Al-Nimr by Saudi Arabia government. Firstly, conflict that happened between Saudi Arabia and Iran caused by sectarianism dimension that's mean Sunni and Shi'ah rivalry in Middle East. Then, sectarianism dimension can evolve into geopolitical competition that Saudi Arabia and Iran's implication in Syria, Iraq and Yemen conflict. Therefore, Middle East conflict requires a peace settlement. Furthermore, the author who takes as Saudi Arabia government in order to solve Saudi Arabia and Iran conflict more likely using Islamic Cooperation Organization (OIC) involvement. Moreover, the author argue that OIC can be conflict resolution agent and Saudi*

*Arabia has affected an OIC. On one hand, the Saudi Arabia was influencing an OIC as the largest country that invest a fund and his domination in OIC structure itself. Therefore, through his influence, Saudi Arabia more profited than military approach. On the other hand, Saudi Arabia has also utilized an OIC as instrument to gain its national interest such as to repress Iran's influence in Middle East*

**Keywords:** *Geopolitics; Iran; Islamic Cooperation Organizations; Saudi Arabia; Sectarianism*

### **Abstrak**

*Kawasan Timur Tengah dapat dipahami sebagai kawasan yang rentan dengan konflik. Adanya konflik di Timur Tengah yang semakin berkembang membutuhkan usaha yang konstruktif dan berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi konflik. Salah satu yang menjadi perhatian komunitas internasional adalah semakin memanasnya konflik yang melibatkan negara Iran dan Arab Saudi terutama pasca pemerintah Arab Saudi menetapkan hukuman mati terhadap Syekh Nimr Al-Nimr. Adapun hubungan konflik antara Iran dan Arab Saudi pada awalnya disebabkan oleh adanya dimensi sektarianisme dalam artian persaingan Sunni dan Syi'ah di Timur Tengah. Kemudian, dimensi sektarianisme berkembang menjadi kompetisi geopolitik yakni keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik Iraq, Suriah dan Yaman. Untuk itu melihat dari kondisi di atas tentunya membutuhkan penyelesaian sedemikian rupa. Lebih lanjut, menurut peneliti yang mencoba menempatkan posisinya sebagai pemerintah Arab Saudi dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik dengan Iran lebih cenderung menggunakan keterlibatan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Alasan peneliti lebih cenderung menggunakan OKI dalam menyelesaikan konflik karena Arab Saudi*

*memiliki kedudukan yang besar dalam OKI. Di satu sisi, kedudukan yang dimaksud yaitu sebagai negara pendonor terbesar dan dominasinya dalam struktur lembaga OKI itu sendiri. Untuk itu melalui kedudukannya tentu Arab Saudi sangat diuntungkan daripada menggunakan militer. Di sisi lain, Arab Saudi juga memanfaatkan OKI sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu membendung pengaruh Iran di Timur Tengah.*

**Kata Kunci:** Arab Saudi, Geopolitik, Iran, Organisasi Kerjasama Islam, Sektarianisme.

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya konflik dalam fenomena hubungan internasional merupakan sesuatu yang alamiah terjadi karena dipicu oleh adanya perbedaan pendapat dalam memandang sesuatu (Galtung, 2007, p. 17). Kemudian konflik yang terjadi secara terus menerus tentunya dapat memberikan ancaman terhadap stabilitas politik yang pada akhirnya akan mendorong negara-negara di dalam suatu kawasan senantiasa terlibat secara aktif dalam suatu konflik. Di satu sisi bahwa suatu negara memiliki kekuatan tersendiri dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan negaranya.

Berbicara mengenai konflik yang terjadi hingga saat ini adalah konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, antara Iran dan Arab Saudi. Adapun pemicu yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang semakin berkelanjutan disebabkan oleh adanya dimensi sektarianisme (Patnistik, 2016). Dimensi sektarianisme dipandang sebagai faktor utama dalam konflik Arab Saudi dan Iran yang mengalami keberlanjutan. yang dimaksud dengan dimensi sektarianisme adalah bahwa Iran dan

Arab Saudi memiliki pandangan berbeda terkait mengenai agama Islam dalam versi yang berbeda karena Muslim telah terpisah dalam dua golongan yang berbeda diantaranya adalah Sunni dan Syi'ah. Sehingga dalam konteks Timur Tengah, perbedaan paham keagamaan antara Sunni dan Syi'ah cenderung dikaitkan dengan adanya konflik untuk senantiasa mendapatkan kekuasaan dan sumber daya (Black, 2015).

Selain itu, apabila dilihat dari perspektif sejarah, hubungan konflik antara Iran dengan Arab Saudi dimulai saat terjadinya Revolusi Republik Islam Iran 1979 dan Perang Iraq-Iran 1980-1988 (Boone, 2012, p. 1). Peristiwa Revolusi Republik Islam Iran merupakan salah satu bentuk penggulingan kekuasaan rezim monarki yang didalamnya juga terdapat konflik sektarian Sunni dan Syi'ah (Samosir, 2016). Selanjutnya konflik antara Iran dan Arab Saudi semakin berkembang dengan keterlibatan Arab Saudi dalam mendukung Iraq untuk melawan Iran dalam peristiwa Perang Iraq-Iran 1980-1988 sehingga kedua peristiwa di atas menunjukkan awal terjadinya rivalitas Iran dan Arab Saudi di Timur Tengah.

Hubungan konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang bermula dari dimensi sektarianisme berkembang menjadi kompetisi secara geopolitik. Hal ini menciptakan rivalitas kedua negara hingga saat ini (Adib-Moghaddam, 2016). Faktor geopolitik yang menimbulkan konfrontasi dapat dilihat melalui keterlibatan Iran dan Arab Saudi dalam konflik di Suriah dan Yaman.

Pada konflik yang terjadi di Suriah tahun 2016, Arab Saudi memberikan dukungan pada pemberontak dengan mengirimkan pasukan perang (FM, 2016). Di satu sisi, pengiriman pasukan dipahami sebagai sarana pemerintah Arab Saudi untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad. Akan tetapi di sisi lain,

tujuan pemerintah Arab Saudi terlibat secara tidak langsung dalam konflik di Suriah adalah untuk meminimalisir pengaruh Iran melalui Hizbullah. Hizbullah sendiri merupakan kelompok yang dilabeli oleh Dewan Kerjasama Teluk sebagai kelompok terorisme untuk menopang rezim Bashar Al-Assad (Arhab, 2016). Dengan meminimalisir pengaruh Hizbullah, tentunya akan memudahkan Arab Saudi menggeser posisi geopolitik Iran dan Presiden Bashar Al-Assad dalam persaingan di Timur Tengah.

Selanjutnya Iran dan Arab Saudi juga terlibat secara tidak langsung dalam konflik di Yaman tahun 2015. Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Yaman yaitu dengan mengirimkan pasukan dan melakukan kampanye militer untuk melawan pemberontak dari kalangan Syi'ah Houthi (Ighani, 2016). Iran mendukung pemberontak Syi'ah Houthi disebabkan karena adanya kesamaan identitas. Maka dari itu, kelompok Syi'ah Houthi dapat juga dilihat sebagai *Iranian Puppet* dalam mendapatkan kekuasaan (Fisher, 2016).

Konflik yang sudah ada sebelumnya, makin meningkat ketegangannya ketika otoritas Arab Saudi menetapkan hukuman mati terhadap ulama kharismatik Syi'ah yaitu Syekh Nimr Al-Nimr dengan dakwaan terorisme (Samosir, 2016). Pasca eksekusi mati Syekh Nimr, Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dan negara sekutunya dalam hal ini Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain dan Kuwait (Setyanti, 2016). Eksekusi mati ini akan semakin menghambat upaya perdamaian untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah (Behn, 2016).

Usaha menuju perdamaian menjadi hal yang penting, mengingat bahwa kedua negara ini memiliki posisi penting di kawasan Timur Tengah. Berbicara mengenai posisi Arab Saudi

dapat dilihat dalam perkembangan politik dan ekonomi di Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya paham Sunni yang mendominasi di mayoritas negara Timur Tengah dalam usahanya untuk membendung kekuatan paham Syi'ah yang diprakarsai oleh Iran. Artinya penyebaran ideologi menjadi salah satu sarana Arab Saudi dalam meningkatkan kedudukannya di Timur Tengah. Dengan adanya konflik antara Iran dan Arab Saudi tepatnya pasca eksekusi mati Syekh Nimr oleh pemerintah Arab Saudi membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengkaji bagaimana upaya Arab Saudi melalui Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi tahun 2013-2018.

### **Tinjauan Teoritis**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori aktor rasional. Pada dasarnya manusia telah diberikan akal dan pengetahuan untuk berfikir terhadap sesuatu. Artinya setiap manusia harus mampu menggunakan pemikirannya untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam berkehidupan. Adapun kaitannya dengan teori aktor rasional beranggapan bahwa manusia bersifat rasional, sehingga tindakan yang dilakukan oleh aktor tertentu dianggap rasional karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman (Rafael Witteck, 2013, pp. 1-2). Lebih lanjut peneliti dalam menjelaskan teori aktor rasional lebih cenderung menggunakan gagasan Graham T. Allison.

Menurut Graham T. Allison bahwa dalam menentukan politik luar negeri suatu negara harus memperhatikan berbagai konsekuensi yang akan diterima dari kebijakan tersebut. Penjelasan

di atas merupakan suatu interpretasi dari pernyataan Graham yaitu: “ *governments select the action that will maximize strategic goals and objectives*”(Allison G. T., 1971, p. 32). Adapun gagasan Graham di atas jugamenjelaskan bahwa objek dari teori aktor rasional mengacu pada bagaimana pengambil keputusan (*decision maker*) dapat menentukan perilakunya dalam mencapai kepentingan luar negerinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara tersebut (Paul Anand, 2009, p. 16).

Untuk itu pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh pemimpin suatu negara didasarkan pada sesuatu yang sangat diperlukan negaranya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki negara tersebut. Maka dari itu, aktor negara harus selalu mengedepankan aspek kebutuhan dari pada keinginan. Dari paparan informasi di atas, peneliti beranggapan bahwa secara tradisional, suatu negara harus memiliki posisi penting dalam keberlangsungan hidupnya. Apalagi yang berkaitan erat dengan politik luar negeri sehingga dengan adanya posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang semakin tinggi tentunya dapat dipahami negara lain sebagai kekuatan dalam membangun hubungan luar negeri. Maka pada akhirnya, posisi tersebut dapat menarik perhatian dari negara lainnya untuk mendapatkan apa yang negara tersebut butuhkan.

Selain itu, menurut Graham T. Allison negara dikatakan sebagai aktor rasional yang mampu menentukan pilihan kebijakan yang paling menguntungkan dalam mencapai kepentingannya (Allison, 1971, p. 33). Lebih lanjut, asumsi di atas mengacu pada pentingnya kemampuan negara dalam memilih keputusan karena akan mempengaruhi hasil akhir. Untuk itu, negara melalui pemerintahnya harus menghindari konsekuensi yang paling

merugikan dalam mencapai tujuannya. Adapun asumsi di atas juga dapat mendukung anggapan bahwa negara menjadi pemain utama dalam hubungan internasional karena berkaitan erat dengan hasil kompetisi antar aktor (Shahryarifar, 2016, pp. 25-26). Akan tetapi, hal lainnya yang dianggap penting untuk diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya suatu permasalahan yang terjadi tentunya aktor individu dalam hal ini pemimpin suatu negara juga dianggap penting dalam perkembangan dunia politik. Maka dari itu, teori aktor rasional berkaitan dengan prosedur pembuatan keputusan.

Sementara itu, sebagai makhluk yang rasional tentunya memiliki berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan (*goals*) yang ingin dicapai oleh aktor negara. Dalam mencapai tujuannya, aktor harus menentukan berbagai alternatif yang akan membawa mereka menuju keuntungan yang maksimal sehingga penting untuk menentukan tindakan yang diprioritaskan (Borgotta, 1992, p. 34). Adapun dalam konteks politik internasional, perilaku yang dilakukan oleh suatu negara menjadi pertimbangan dalam merealisasikan agendanya.

Asumsi lainnya dari teori aktor rasional yang mendukung gagasan Graham T. Allison mengacu pada penggunaan cara yang bersifat efisien dalam mencapai keuntungan yang paling maksimal dan berusaha untuk menghindari tindakan yang mengarah pada perolehan kerugian (Budiardjo, 2013, p. 93). Terlepas dari hal tersebut perilaku manusia hanya merupakan instrumen dalam untuk melakukan perhitungan yang rasional dan merumuskan perilaku dari aktor lainnya. Maka dari itu, optimalisasi kepentingan dapat dipahami sebagai inti dari teori aktor rasional. Selain itu,

tujuan dan sasaran yang tersusun secara sistematis oleh negara setidaknya akan mencerminkan preferensinya terkait tindakan apa yang diperlukan (Jonge, 2012, pp. 7-9). Di satu sisi, setiap manusia memiliki keterbatasan dalam hal berfikir karena didasarkan pada pengetahuan yang mereka dapatkan. Di sisi lain bahwa pembuatan pilihan harus senantiasa dipertimbangkan dan dioptimalkan karena akan mempengaruhi hasil.

Lebih lanjut, aplikasi dari teori aktor rasional di atas dalam tulisan ini yaitu aktor negara dalam hal ini pemerintah di bawah kepemimpinan Raja Salman menentukan tindakan yang lebih diutamakan dalam mencapai kepentingannya. Berbicara mengenai salah satu kepentingan yang diprioritaskan saat ini adalah menyelesaikan konflik antara Arab Saudi dan Iran. Selanjutnya, negara Arab Saudi dibawah kepemimpinan Raja Salman dapat menyusun berbagai tindakan yang akan dilakukan oleh OKI dalam menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian Arab Saudi melakukan identifikasi dan analisa berbagai pilihan yang telah tersedia. Langkah berikutnya yaitu Arab Saudi akan senantiasa menelusuri terkait biaya dan manfaat yang akan didapatkan setelah menentukan pilihan. Namun dalam tahapan ini, aktor dalam hal ini negara harus mampu memperkirakan berbagai konsekuensi yang akan terjadi jika memilih opsi yang dianggap paling menguntungkan. Artinya bahwa tidak hanya melibatkan keuntungan maupun kerugian semata akan tetapi harus mampu merumuskan efek jangka pendek dan jangka panjang jika pilihan terbaik tersebut menjadi opsi yang paling baik.

## **Pembahasan**

Upaya Arab Saudi Terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam Menyelesaikan Konflik Iran dan Arab Saudi Tahun 2013-2018

Negara menurut Graham T. Allison merupakan aktor rasional yang dapat menentukan pilihan kebijakan yang paling menguntungkan dalam mencapai kepentingannya (Allison, 1971, p. 33). Berangkat dari pendapat tersebut, kemampuan negara dalam memilih keputusan menjadi hal penting karena akan mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, negara melalui pemerintahnya harus menghindari konsekuensi yang paling merugikan dalam mencapai tujuannya.

Dari asumsi tersebut, aktor negara Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman yang akan menentukan tindakan mana yang lebih diprioritaskan dalam mencapai kepentingannya. Berbicara mengenai salah satu kepentingan yang diutamakan saat ini adalah menyelesaikan konflik antara Arab Saudi dan Iran. Selanjutnya, negara Arab Saudi menyusun berbagai tindakan yang akan dilakukan oleh OKI dalam menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian Arab Saudi melakukan identifikasi dan analisa berbagai pilihan yang telah tersedia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka akan dibahas mengenai upaya Arab Saudi dalam OKI, yang meliputi penjelasan mengenai Arab sebagai negara pendonor terbesar OKI dan dominasi Arab Saudi terhadap susunan struktur kelembagaan OKI. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai OKI sebagai landasan politik Arab Saudi dalam meminimalisir pengaruh Iran di Timur Tengah.

#### **A. Upaya Arab Saudi dalam Organisasi Kerja sama Islam**

Dalam politik internasional, negara memiliki kedudukan dan posisi penting dalam menentukan keberlangsungan hidupnya. Suatu negara akan senantiasa membangun hubungan luar negeri dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan

tersebut bisa antara satu negara dengan negara lain secara mandiri maupun hubungan negara dalam organisasi internasional. Dalam konteks hubungan negara yang berada dalam satu organisasi internasional, adanya kewenangan tertentu yang dimiliki oleh suatu negara tentunya dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam membangun kekuatan untuk menyebarluaskan pengaruhnya terhadap organisasi tersebut.

Oleh sebab itu, suatu negara bisa melakukan upaya untuk menyebarkan pengaruhnya melalui keberadaan dari organisasi internasional. Dalam hal ini, Arab Saudi berupaya menyebarkan pengaruhnya terhadap internal kelembagaan OKI diantaranya dengan cara menjadi pendonor terbesar yang diikuti dengan dominasinya terhadap hubungan bilateral dengan mayoritas negara anggota OKI dan kapasitasnya dalam susunan struktur organisasi (Ahmed, 2017, pp. 1-3).

### **1. Arab Saudi sebagai negara pendonor terbesar**

Arab Saudi berusaha memberikan pengaruhnya dalam bentuk bantuan dana terutama untuk negara anggota OKI. Bantuan dana tersebut diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sejak tahun 1970 sebesar US\$ 100 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa masjid, madrasah dan lembaga budaya. (Dorsey, 2016). Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi merupakan usaha agar negara lain mengikuti apa yang diinginkannya. Kemudian dalam perkembangannya Arab Saudi mencoba untuk menyebarluaskan pengaruh ideologinya atau yang dikenal dengan gagasan Wahabisme.

Tidak hanya memberikan bantuan infrastruktur, Arab Saudi juga memberikan beasiswa kepada pelajar negara anggota OKI

yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi Islam di Arab Saudi. Beasiswa untuk 2.053 pelajar dari 130 negara telah disiapkan pemerintah Arab Saudi (Toumi, 2012). Program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ini dapat dilihat sebagai usaha yang sistematis dan terorganisir dalam menyebarluaskan ideologinya khususnya terhadap negara anggota OKI.

Bantuan dana yang diberikan oleh Arab Saudi juga telah didukung dengan adanya Kantor Sekretariat OKI yang berada di Arab Saudi dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang berpusat di Jeddah. IDB tersebut didirikan dengan tujuan mendorong dan memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara anggota OKI. Dan pada tahun 2008 IDB telah memiliki modal sebesar US\$ 2 Miliar untuk menjalankan programnya (Zuhur, 2011, p. 169). Dengan adanya sarana pendukung di atas, tentunya Arab Saudi memiliki posisi penting terhadap kontrol dari lembaga tersebut. Selain itu, Arab Saudi juga telah mengalokasikan bantuan keuangan sebesar US\$ 1 Miliar ke IDB untuk menunjang program pengentasan kemiskinan (Johnson T. , 2010).

Arab Saudi telah mendistribusikan bantuan keuangan hingga mencapai US\$ 22,7 Miliar yang diterima oleh Yaman, Mesir, Palestina, Yordania, Oman dan Bahrain. (Arab News, 2015). Selain itu, pada tahun 2015 Arab Saudi bersama dengan negara Uni Emirat Arab, Kuwait dan Oman juga telah mendistribusikan bantuan dana sebesar US\$ 12,5 Miliar kepada Mesir (Al-Arabiya News, 2015). Lebih lanjut, dalam kurun waktu 1985-2015 diperkirakan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menghabiskan dana sebesar US\$ 130 Miliar untuk bantuan luar negerinya (Kechichian, 2016). Alasan Arab Saudi memberikan bantuan dana kepada Mesir karena merupakan

negara sekutu Arab Saudi yang juga memiliki kedekatan hubungan dengan Israel (Hannah J. , 2016). Selanjutnya, hubungan Mesir dan Israel tentunya memudahkan Arab Saudi untuk melakukan dialog secara intensif dengan Israel.

Adanya kofrontasi antara Iran dengan Arab Saudi, membuat kedua negara berusaha untuk mempunyai pengaruh di Timur Tengah. Ketegangan yang terjadi antara Iran dengan Arab Saudi yang terjadi hingga saat ini membuat mereka harus saling terlibat dalam *proxy war* baik di Iraq, Suriah, dan Yaman. Kemudian faktor lainnya yaitu adanya program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran membuat Arab Saudi harus segera bertindak sedemikian rupa. Adapun tindakan yang diambil adalah mengintensifkan hubungan bilateral yang pada akhirnya akan memberikan suara penolakan terhadap program nuklir Iran yang dipandang oleh Israel dan Arab Saudi sebagai suatu ancaman keamanan (Spencer, 2015).

Untuk itu, Arab Saudi dan Israel menganggap adanya kebangkitan Iran di Timur Tengah yang diikuti dengan intervensi Iran dalam urusan bilateral negara lainnya merupakan sesuatu yang sifatnya lebih mendesak dibandingkan dengan isu Palestina (Hannah, 2016). Artinya Israel dan Arab Saudi mencoba untuk menekan Iran dalam menyebarluaskan pengaruhnya dengan tujuan untuk menciptakan aliansi baru. Dengan demikian, bantuan keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah Arab Saudi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki *power* untuk mempengaruhi negara lainnya atas apa yang mereka kehendaki.

Maka dari itu, strategi di atas dapat membuahkan hasil yang cukup positif yaitu setiap negara yang menerima bantuan Arab

Saudi senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan luar negeri Arab Saudi terutama yang tergabung dalam OKI. Oleh karena itu, ketergantungan OKI yang cukup besar terhadap pendanaan Arab Saudi menunjukkan bahwa organisasi tersebut rentan terhadap dominasi Arab Saudi. Hal lainnya yang menarik untuk diketahui bahwasanya selain melalui dana, Arab Saudi juga senantiasa meningkatkan eksistensinya dalam konteks dominasi terhadap susunan struktur dalam internal kelembagaan OKI.

## **2. Dominasi terhadap susunan struktur kelembagaan OKI**

Selain dominan dalam pendanaan, Arab Saudi juga berusaha mendominasi susunan struktur kelembagaan OKI. Hal ini ditunjukkan oleh Arab Saudi dengan menjadi tempat Sekretariat Akedemi Fiqh Islam Internasional yang didirikan tahun 1981 atas dasar kesepakatan dari negara anggota OKI (Ihsanoglu, 2010, p. 42). Adapun pendirian Akademi Fiqh Islam Internasional di Mekkah tersebut dapat memperkuat legitimasi Arab Saudi dalam konteks pengetahuan dan yurisprudensi Islam. Untuk itu, adanya institusi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu sarana penting dalam menyebarkan Islam versi Arab Saudi.

Tujuan didirikannya Akademi Fiqh Islam Internasional yaitu untuk mengembangkan proses ijtihad secara kolektif yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang dihadapi oleh umat Islam (Samuel, 2013, p. 107). Adanya proses ijtihad yang dilakukan oleh negara anggota OKI merupakan sarana dalam menentukan dasar hukum Islam selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari itu, dengan adanya dukungan dari negara anggota OKI tentunya dapat memperkuat eksistensi dari kepemimpinan Arab Saudi terhadap

pengetahuan Islam.

Selanjutnya posisi kantor pusat OKI yang berada di Arab Saudi memberikan keuntungan bagi Arab Saudi. Keberadaan sekretariat tersebut memberikan keistimewaan kepada negara tuan rumah untuk memobilisasi berbagai pertemuan dalam bentuk bilateral atau multilateral terhadap negara anggota OKI. Kemudian hal terpenting lainnya yang didapatkan oleh Arab Saudi adalah dengan terpilihnya Yousef Ahmed Al-Othaimen sebagai Sekretaris Jendral OKI yang berpusat di Arab Saudi tahun 2016 (Arab News, 2016).

Tidak berhenti di situ, Arab Saudi semakin meningkatkan upaya dominasinya terhadap negara OKI dengan jalan membangun aliansi militer. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembentukan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFT)* tahun 2015 atas inisiasi dari Arab Saudi dan beranggotakan 34 negara anggota OKI (Global Security Organizations, 2018). Pembentukan lembaga tersebut tentunya bertujuan untuk mengorganisir operasi militer dalam rangka memberantas aksi terorisme di Timur Tengah.

Pembentukan IMAFT tersebut juga mendapatkan dukungan dari negara Amerika Serikat. Adanya dukungan tersebut secara spesifik tertuang dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Trump ketika melakukan kunjungan ke Arab Saudi tahun 2017 (White House, 2017). Adapun isi pernyataan tersebut yaitu:

1. The two leaders affirmed their determination to unite and integrate efforts between the United States-led Global Coalition against ISIS with Saudi Arabia and the Saudi-led Islamic Military Alliance to Fight Terrorism.
2. The two leaders also stressed that Iran's interference poses a threat to the security of the region and the world, and that

the nuclear agreement with Iran needs to be re-examined in some of its clauses. The Iranian ballistic missile program poses a threat, not only to neighboring countries, but also a direct threat to the security of all countries in the region as well as global security.

Pernyataan di atas menunjukkan legitimasi yang diberikan oleh pemerintah Amerika tersebut dipahami sebagai usaha Arab Saudi untuk melawan pengaruh Iran di Timur Tengah. Selain itu Arab Saudi mencoba untuk memberantas aksi terorisme di regional Timur Tengah. Usaha tersebut diikuti dengan tindakan meminimalisir kekuatan militer Iran melalui program pengembangan nuklir.

Upaya di atas yang dilakukan Arab Saudi untuk mendominasi OKI semakin optimal. Kondisi ini telah berkontribusi mengarahkan negara anggota OKI ke dalam pola pemikiran Arab Saudi. Khususnya dalam mempromosikan definisi terorisme. Arab Saudi berhasil mengklaim Iran sebagai negara yang mendukung aksi terorisme di Timur Tengah khususnya yang ditujukan kepada Hizbullah (Fabian, 2016). Terbentuknya *IMAFT* meningkatkan eksistensi Arab Saudi untuk menarik negara-negara anggota OKI agar terlibat dalam organisasi keamanan tersebut. Adanya *IMAFT* juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap Arab Saudi.

Arab Saudi memberikan perhatian terhadap negara anggota OKI yang tergabung dalam koalisi Arab Saudi untuk melawan aksi terorisme. Adapun perhatian yang dimaksud adalah dengan memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk pendanaan khususnya kepada Pakistan sebesar US\$ 122 juta (Rana, 2016). Upaya tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap Pakistan karena terlibat langsung dalam keanggotaan *IMAFT*.

Bantuan tersebut diberikan oleh Arab Saudi sebagai upaya untuk mendominasi OKI melalui pendekatan *soft power* dengan menciptakan ketergantungan ekonomi. Dengan adanya ketergantungan OKI terhadap bantuan keuangan Arab Saudi dikhawatirkan dapat menimbulkan efek terhadap netralitas OKI. Netralitas di dunia internasional terutama jika ditemukan konflik antar negara anggota OKI.

Selanjutnya, posisi dan peran Arab Saudi yang dominan dalam internal kelembagaan OKI membuat negara anggota patuh terhadap Arab Saudi. Karena dengan kedudukannya, Arab Saudi dapat melawan negara lain yang dipandang sebagai ancaman dalam mempertahankan eksistensinya di kawasan Timur Tengah maupun OKI. Posisi Arab Saudi yang semakin dominan dalam internal kelembagaan OKI akan memudahkan Arab Saudi dalam mengamankan kepentingan nasionalnya. Karena bisa mengganggu kepentingan nasionalnya, maka pemerintah Arab Saudi mengajak negara anggota OKI untuk menyelesaikan konflik antara Arab Saudi dengan Iran yang semakin memanas terutama pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr tahun 2016.

#### **B. Organisasi Kerja sama Islam sebagai landasan politik Arab Saudi dalam meminimalisir pengaruh Iran di Timur Tengah**

Adanya perseteruan yang meningkat antara Arab Saudi dengan Iran yakni dengan keterlibatan secara tidak langsung dalam konflik di Iraq, Yaman dan Suriah. Hal ini bertujuan untuk memperluas pengaruh masing-masing di Timur Tengah. Selain itu, kondisi tersebut diikuti dengan adanya eksekusi mati terhadap ulama Syi'ah dalam hal ini Syekh Nimr tentunya membuat hubungan

Arab Saudi dan Iran semakin memburuk. Maka dari itu, hubungan konflik yang terus berkembang hingga saat ini membutuhkan usaha yang efektif dan efisien dalam mendamaikan perseteruan antara Iran dengan Arab Saudi.

Arab Saudi sendiri sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Iran terutama pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Pendekatan damai digunakan oleh pemerintah Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan Iran. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut menunjukkan adanya itikad baik yang pada akhirnya akan membentuk suatu perdamaian khususnya di regional Timur Tengah.

Usaha lainnya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Iran dengan menggunakan pihak ketiga atau mediator. Adanya mediator dapat memberikan solusi terkait konflik Arab Saudi dan Iran. Untuk itu pemerintah Arab Saudi meminta kepada Irak melalui Perdana Menteri Haider Al-Abadi untuk menjadi mediator dalam perseteruan antara Arab Saudi dan Iran (O'Toole, 2017). Hal tersebut direspon positif oleh pemerintah Iran atas dasar solidaritas Islam dan untuk mengurangi ketegangan di Timur Tengah.

Inisiatif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka menyelesaikan konflik dengan Iran melalui organisasi internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertemuan negara anggota OKI di Jeddah untuk membahas perkembangan konflik Suriah dan penyerangan demonstrasi Iran terhadap kantor kedutaan Arab Saudi di Teheran (Fauzi G. A., 2017, pp. 1201-1204). Adanya pertemuan negara anggota OKI tersebut diusulkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik di Timur

Tengah khususnya dengan Iran pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Maka dari itu, pemerintah Arab Saudi telah menentukan langkah yang positif untuk membangun hubungan damai dengan Iran.

Dalam perkembangannya, peneliti beranggapan bahwa upaya yang akan diambil oleh Arab Saudi dalam menyelesaikan konfliknya dengan Iran dilakukan melalui OKI. Lebih lanjut, peneliti akan memberikan interpretasi mengenai pendekatan diambil Arab Saudi dengan pendekatan teori aktor rasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa teori aktor rasional berusaha untuk mengamati fenomena dalam hubungan internasional terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh negara. Kemudian dalam menentukan keputusan yang akan diambil, suatu negara membutuhkan berbagai preferensi dan alternatif dalam memperoleh kepentingan yang paling menguntungkan. Dan untuk itu, negara perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk mencapai keuntungan yang maksimal (Hausken, 2016, pp. 454-459).

Pada intinya, upaya Arab Saudi tersebut akan memunculkan suatu pandangan yang menjelaskan kepentingan Arab Saudi di dalam OKI. Dalam hal ini, ketika berbicara mengenai kepentingan Arab Saudi diantaranya adalah memperbaiki harga minyak bumi yang semakin melemah, melawan kebangkitan Iran yang ingin menyebarkan gagasan revolusioner Islam terhadap negara sekutu Arab Saudi, dan mempertahankan eksistensi rezim monarki di Timur Tengah. Adapun dalam mencapai berbagai kepentingan tersebut membutuhkan usaha yang keras dan berkelanjutan agar memperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya, preferensi yang akan

diambil oleh Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan Iran diantaranya dapat menggunakan pendekatan militer (*hard power*) atau menggunakan pendekatan damai (*soft power*). Jika dalam perkembangannya Arab Saudi memilih dengan pendekatan militer dalam hal ini melalui *proxy war* di Iraq, Yaman dan Suriah tentunya akan semakin melemahkan harga minyak bumi yang mencapai US\$ 30 per barel (Ngai, 2016).

Turunnya harga minyak bumi akan berdampak tidak baik untuk Arab Saudi. Hal ini dikarenakan ketergantungan Arab Saudi dari pendapatan minyak bumi sebesar 88% (Reimann, 2016). Selain itu, kerugian yang akan diterima oleh Arab Saudi jika menggunakan pendekatan militer adalah stabilitas politik, ekonomi dan keamanan Timur Tengah semakin terganggu. Selain itu, penggunaan kekerasan telah membuat Arab Saudi menjadi pasar terbesar kedua dalam hal perdagangan senjata dunia dan mengalami peningkatan sebesar 275% terhadap impor senjata tahun 2006-2010 (Fleurant, 2016, p. 8). Untuk itu, Arab Saudi harus senantiasa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh negara tersebut jika menggunakan kekuatan militer.

Alternatif lainnya yang diambil Arab Saudi yaitu dengan menggunakan pendekatan damai. Arab Saudi bisa menggunakan pendekatan sektarian. Secara garis besar, Islam di seluruh dunia menganut paham Sunni, yakni sebesar 87-90% (Jawan, 2013, pp. 1-12). Hal tersebut juga termasuk di dalamnya adalah negara anggota OKI. Selain itu, secara mayoritas negara anggota OKI sebanyak 70% terlibat dalam organisasi keamanan *IMAFT* (Ahmad, 2017, p. 9). Kondisi tersebut didukung dengan adanya ketergantungan terhadap pendanaan Arab Saudi dan dominasi susunan struktur dalam OKI.

Oleh sebab itu, sebagai aktor rasional, Arab Saudi akan cenderung memilih pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik dengan Iran. Hal ini dikarenakan Arab Saudi akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan kerugian jika menggunakan cara damai. Kemudian pendekatan damai yang akan diambil oleh Arab Saudi dinilai akan meminimalisir korban jiwa dan kerusakan fisik diakibatkan adanya konflik di Suriah, Yaman dan Iraq yang juga diikuti oleh Arab Saudi dan Iran. Bahkan hal ini dapat mengurangi tingkat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Peneliti juga beranggapan bahwa jika Arab Saudi lebih memilih untuk menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi Iran tentunya akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Lebih lanjut, pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya meningkatkan anggaran militer. Hal ini dibuktikan bahwa anggaran militer Arab Saudi dalam kurun waktu 2016 sebesar US\$ 47 miliar yang selanjutnya pada tahun 2017 dinaikkan menjadi US\$ 50 miliar, selain itu pada tahun 2018 anggaran lebih ditingkatkan menjadi US\$ 58 miliar (Bharwana, 2017).

Kemudian hingga saat ini Arab Saudi juga telah menjadi negara pembeli terbesar senjata khususnya di kawasan Timur Tengah. Biaya yang telah dihabiskan Arab Saudi lebih dari US\$ 80 miliar dan mengalami peningkatan sebesar 300% (DePetris, 2017). Upaya pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kekuatan militer tentunya didorong oleh adanya cadangan devisa yang besar, pendapatan dari penjualan minyak mentah dan keinginan Arab Saudi untuk mengatasi pengaruh Iran di Timur Tengah.

Akan tetapi pengeluaran yang besar tersebut justru dikhawatirkan tidak sebanding dengan keuntungan yang

diperoleh. Apabila Arab Saudi memutuskan untuk perang dengan Iran, maka pengeluaran untuk militer akan semakin besar dan cenderung merugikan Arab Saudi. Oleh sebab itu, pemerintah Arab Saudi mencoba mempertimbangkan keputusan untuk terus mempertahankan posisinya sebagai negara yang berpengaruh dalam konstelasi politik di Timur Tengah. Lebih lanjut, Arab Saudi berusaha untuk menjadi negara adidaya yang mendominasi ekonomi, militer, politik dan keamanan. Dengan adanya pergeseran posisi Arab Saudi yang menjadi hegemoni tentunya dapat menarik perhatian publik khususnya di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya, Arab Saudi juga telah berhasil menggunakan forum OKI dalam mencapai kepentingannya yaitu membangun suatu front untuk menghentikan kebangkitan Islam Iran di regional Timur Tengah. Untuk itu, perlu untuk diketahui bahwa tujuan pembentukan OKI adalah untuk menaungi kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Lebih lanjut bahwa kapasitas OKI sebagai agen resolusi konflik yang juga telah menjadi mitra PBB dalam menyelesaikan konflik khususnya yang melanda umat Islam (UN News Center , 2016).

Artinya, OKI telah mendapatkan kepercayaan dari PBB untuk menentukan langkah dalam mendamaikan negara yang sedang berkonflik. Karena tujuan didirikannya OKI untuk mengakomodir kepentingan umat Islam terutama dalam hal penyelesaian konflik, maka OKI senantiasa harus menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan konflik umat Islam itu sendiri. Adapun komitmen dari Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik di dunia Islam khususnya terhadap negara anggotanya telah tertuang dalam piagamnya yaitu (OIC, 2018)

## CHAPTER XV

### Peaceful Settlement of Disputes

#### Article 27

The Member States, parties to any dispute, the continuance of which may be detrimental to the interests of the Islamic Ummah or may endanger the maintenance of international peace and security, shall, seek a solution by good offices, negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice. In this context good offices may include consultation with the Executive Committee and the Secretary-General.

#### Article 28

The Organisation may cooperate with other international and regional organisations with the objective of preserving international peace and security, and settling disputes through peaceful means.

Uraian terkait isi dari piagam OKI di atas menunjukkan bahwa organisasi Islam tersebut akan senantiasa berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap adanya perselisihan yang terjadi terhadap negara anggotanya. Adapun penyelesaiannya melalui cara yang bersifat persuasif dan pendekatan damai. Penggunaan cara damai yang dilakukan oleh OKI mengacu pada mekanisme ajaran Islam dalam mengatasi konflik.

Namun dalam perkembangannya, OKI menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah diselesaikan berkaitan dengan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Maksudnya adalah baik Arab Saudi maupun Iran berusaha memanfaatkan forum-forum yang diselenggarakan OKI. Kedua negara menjadikan

forum tersebut sebagai sarana dalam menyebarluaskan pengaruh sektariannya terhadap dunia Islam (Johnson, 2010).

Lebih lanjut, Arab Saudi memandang OKI sebagai sarana dalam mendapatkan pengaruh secara geopolitik dan senantiasa menegaskan kepemimpinan Arab Saudi dalam menentukan tujuan bersama terhadap organisasi tersebut (Destradi, 2008, pp. 5-7). Hal di atas telah menunjukkan bahwa pembentukan OKI menjadikan Arab Saudi memiliki suara terdepan di dunia Islam itu sendiri.

Untuk itu, Arab Saudi membangun kekuatan dengan mengajak negara anggota OKI untuk menghentikan kebangkitan Iran dan sekutunya di Timur Tengah. Kemudian OKI dimanfaatkan oleh Arab Saudi untuk membentuk pandangan yang mendukung Arab Saudi dalam meminimalisir kebangkitan Iran itu sendiri. Maka dari itu, keberhasilan Arab Saudi dalam mengatasi Iran dan sekutunya di Timur Tengah dapat dilihat pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 yang diselenggarakan di Turki tahun 2016 yang menghasilkan resolusi.

Adapun resolusi yang dihasilkan oleh OKI ditujukan kepada negara anggotanya yaitu Iran. Selain itu, isi dari resolusi menunjukkan bahwa Iran merupakan negara yang mendukung aksi terorisme Hizbullah. Lebih lanjut bahwa negara anggota OKI mengharapkan Iran tidak melakukan intervensi terhadap urusan dari negara anggota lainnya pada konflik di Suriah, Iraq dan Yaman.

Walaupun demikian, adanya pertemuan negara anggota OKI dalam KTT OKI ke-13 tahun 2016 yang berlangsung di Turki juga menjadi peluang potensial bagi Arab Saudi. Adapun peluang tersebut yaitu Arab Saudi berusaha untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad di Suriah yang dinilai oleh

Arab Saudi sebagai sekutu Iran dan ancaman dalam menghalangi kepemimpinan Arab Saudi (Ezzat, 2016). Lebih lanjut, Arab Saudi senantiasa memanfaatkan momentum dalam pertemuan tersebut sebagai alat untuk meningkatkan dukungan terhadap Arab Saudi dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa adanya suatu perbedaan paham keagamaan Sunni dan Syi'ah khususnya terhadap negara anggota OKI tidak dapat menjadi sumber persatuan. Kondisi tersebut juga telah berkontribusi dalam menciptakan sumber ketegangan antar negara anggota OKI karena perbedaan sektarian. Lebih lanjut, baik Arab Saudi maupun Iran yang memiliki kekayaan dalam hal minyak mentah dan kemampuan secara finansial tentunya dapat memunculkan strategi yang cukup agresif dalam mencapai kepentingannya, sehingga akan sulit untuk memisahkan tujuan politik, diplomatik dan keagamaan (Haynes, 2001, pp. 143-158).

## **Kesimpulan**

Konflik antara Iran dengan Arab Saudi pada mulanya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan atau sektarianisme Sunni dan Syi'ah. Namun dalam perkembangannya konflik Iran dan Arab Saudi yang terjadi hingga saat ini, selain dipicu oleh perbedaan paham keagamaan Sunni dan Syi'ah juga dipengaruhi oleh adanya kompetisi secara geopolitik khususnya di regional Timur Tengah. Lebih lanjut, adanya persaingan secara geopolitik yang diikuti oleh Arab Saudi dan Iran dapat dilihat dalam keterlibatan kedua negara tersebut dalam *proxy war* di Suriah, Iraq dan Yaman.

Lebih lanjut, melihat dari hubungan Iran dan Arab Saudi yang mengarah pada konflik tepatnya setelah adanya eksekusi mati

terhadap Syekh Nimr Al-Nimr pada tahun 2016 membutuhkan tindakan yang mengarah pada normalisasi hubungan damai. Adapun menurut peneliti, jika dilihat dari teori aktor rasional bahwa Arab Saudi harus menentukan preferensi yang pada akhirnya akan memperoleh hasil yang maksimal. Berbicara mengenai tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam membangun hubungan damai dengan Iran adalah menggunakan pendekatan damai yaitu melalui forum dalam internal kelembagaan OKI. Arab Saudi memilih penyelesaian dengan cara damai adalah untuk memperoleh hasil yang optimal.

Alasan lainnya adalah bahwa Arab Saudi mampu mempengaruhi OKI melalui pemberian bantuan dana yang diberikan kepada IDB yang berbasis di Jeddah. Lebih lanjut, adanya pemberian dana yang juga diterima oleh negara anggota OKI mampu memberikan dampak positif terhadap Arab Saudi yaitu mampu menarik perhatian negara anggota OKI untuk terlibat dalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFIT)*. Untuk itu, adanya kerja sama internasional antar negara OKI dalam bidang keamanan tentunya dapat menjadikan Arab Saudi semakin mudah untuk memperoleh aliansi keamanan dalam memberantas organisasi terorisme khususnya di regional Timur Tengah.

Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa penyelesaian konflik Arab Saudi dan Iran dengan melibatkan OKI cenderung memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan yang dimaksud adalah Arab Saudi ingin mengubah posisinya di OKI yang pada awalnya sebagai pemimpin menjadi hegemoni di dalam suatu rezim internasional.

## Referensi

- Adib-Moghaddam, A. (2016, Januari 05). *The tension between Iran and Saudi Arabia has little to do with religion*. Retrieved Januari 18, 2018, from The Independent: <http://www.independent.co.uk/voices/the-tension-between-iran-and-saudi-arabia-has-little-to-do-with-religion-a6797476.html>
- Ahmad, S. A. (2017). Impacts of Saudi Hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC). *International Journal of Politic, Culture and Social*, 09.
- Ahmed, S. A. (2017). Impactsof SaudiHegemony on theOrganizationofIslamic Cooperation (OIC). *International Journal of Politic, Cultural and Social*, 1-3.
- Al-Arabiya News. (2015, Mei 31). *Gulf states offer \$12.5 billion aid to Egypt*. Retrieved Februari 01, 2018, from Al-Arabiya News: <http://english.alarabiya.net/en/business/economy/2015/03/13/Saudi-announces-4-billion-aid-package-to-Egypt.html>
- Allison. (1971). *Essence of Decision : Explaning the Cuban Misile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision : Explaning the Cuban Misile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company.
- Arab News. (2015, Mei 19). *Egypt, Yemen are top recipients of Saudi aid*. Retrieved Februari 01, 2018, from Arab News: <http://www.arabnews.com/news/748966>
- Arab News. (2016, November 18). *OIC elects new secretary-general*. Retrieved Februari 02, 2018, from Arab News: <http://www.arabnews.com/node/1011981/saudi-arabia>
- Arhab, Y. (2016, Maret 12). *Arab League labels Hezbollah a 'terrorist'*

- group*. Retrieved Januari 18, 2018, from Al-Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/2016/03/arab-league-labels-hezbollah-terrorist-group-160311173735737.html>
- Armandhanu, D. (2016, Januari 26). *Sanksi Iran Dicabut, Perusahaan Barat Merapat*. Retrieved Januari 23, 2018, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160126114953-134-106705/sanksi-iran-dicabut-perusahaan-barat-merapat>
- Behn, S. (2016, Januari 05). *Arab Saudi, Iran Putuskan Hubungan Diplomatik, Ketegangan di Timur Tengah Meningkat*. Retrieved Januari 16, 2018, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/arab-saudi-iran-putuskan-hubungan-diplomatik-ketegangan-di-timur-tengah-meningkat/3131593.html>
- Bharwana. (2017, Desember 21). *Saudi Arabia increases defence budget*. Retrieved Februari 27, 2018, from Pakistan Defence: <https://defence.pk/pdf/threads/saudi-arabia-increases-defence-budget.534605/>
- Black, I. (2015, April 05). *Sunni v Shia: why the conflict is more political than religious*. Retrieved Januari 10, 2018, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2015/apr/05/sunni-shia-why-conflict-more-political-thanreligious-sectarian-middle-east>
- Boone, M. T. (2012). *Rivalry in the Middle East : Saudi Arabia and Iran*. New York: Nova Science Publisher.
- Borgotta, E. F. (1992). *Encyclopedia of Sociology*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- DePetris, D. R. (2017, Mei 19). *The 5 Deadliest Weapons That Saudi Arabia Has In Its Military*. Retrieved Februari 27, 2018, from The National Interest: <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-5-deadliest-weapons-saudi-arabia-has-its-military-20752?page=2>
- DeStradi, S. (2008). *Empire, hegemony, and leadership: developing a research framework for the study of regional powers*. Hamburg: Institute of Global and Area Studies.
- Dorsey, J. M. (2016, Juli 29). *Creating Frankenstein: The Impact of Saudi Export Ultra-Conservatism in South Asia*. Retrieved Februari 01, 2018, from Social Science Research Network: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2813898](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2813898)
- Erickson, A. (2017, Desember 20). *What's behind the feud between Saudi Arabia and Iran? Power*. Retrieved Januari 23, 2018, from The Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/12/20/whats-behind-the-feud-between-saudi-arabia-and-iran-power/?utm\\_term=.d43bd88e1017](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/12/20/whats-behind-the-feud-between-saudi-arabia-and-iran-power/?utm_term=.d43bd88e1017)
- Ezzat, D. (2016, April 16). *OIC summit bolsters Saudi influence at expense of rival Iran*. Retrieved Februari 05, 2018, from Ahram Online: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/199717/World/Region/OIC-summit-bolsters-Saudi-influence-at-expense-of.aspx>
- Fabian, K. P. (2016, Januari 06). *The Iran-Saudi Confrontation: Who will win in the end?* Retrieved Februari 05, 2018, from Institute for Defence Studies and Analyses: [https://idsa.in/idsacomments/the-iran-saudi-confrontation\\_kpfabian\\_060116](https://idsa.in/idsacomments/the-iran-saudi-confrontation_kpfabian_060116)

- Fauzi, G. A. (2017). KETERLIBATAN INDONESIA DALAM PRA MEDIASI ARAB SAUDI DAN IRAN TAHUN 2016. *e-Journal Hubungan Internasional*, 1201-1204.
- Fisher, M. (2016, Januari 04). *The cold war between Saudi Arabia and Iran that's tearing apart the Middle East, explained*. Retrieved Januari 18, 2018, from The Vox News: <https://www.vox.com/2016/1/4/10708682/sunni-shia-iran-saudi-arabia-war>
- Fleurant, P. D.-F. (2016). *Trends in international arms transfer, 2015*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.
- FM. (2016, Januari 04). *Saudi Arabia and Iran*. Retrieved Januari 18, 2018, from International Relations Organizations: <http://internationalrelations.org/saudi-arabia-and-iran/>
- Galtung, C. W. (2007). *Handbook of Peace and Conflict*. New York: Routledge.
- Global Security Organizations. (2018, Januari 03). *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFI)*. Retrieved Februari 02, 2018, from Global Security Organizations: <https://www.globalsecurity.org/military/world/int/ima.htm>
- Gravingholt, S. B. (2016). *The securitization of foreign aid*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Guzanski, Y. (2015, Juli 22). *Saudi Arabia and the Nuclear Agreement with Iran*. Retrieved Januari 23, 2018, from The Institute for National Security Studies: <http://www.inss.org.il/publication/saudi-arabia-and-the-nuclear-agreement-with-iran/>
- Hannah. (2016, Agustus 26). *Saudi Arabia Strikes Back*. Retrieved Februari 02, 2018, from Foreign Policy: <http://foreignpolicy.com/2016/08/16/saudi-arabia-strikes-back-3/>

- Hannah, J. (2016, Mei 16). *Foreign Policy*. Retrieved Februari 02, 2018, from For Middle East Peace, Look to Israel's Arab Partners: <http://foreignpolicy.com/2016/05/16/on-middle-east-peace-do-this-not-that/>
- Hausken, K. (2016). Cost benefit analysis of war. *International Journal of Conflict Management*, 454-459.
- Haynes, J. (2001). Transnational religious actors and international politics. *Third World Quarterly*, 143-158.
- Ighani, H. (2016, Oktober 25). *Managing the Saudi-Iran Rivalry*. Retrieved Januari 18, 2018, from Council on Foreign Relations: [https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2016/10/Workshop\\_Report\\_CPA\\_Saudi\\_Iran\\_Rivalry\\_OR.pdf](https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2016/10/Workshop_Report_CPA_Saudi_Iran_Rivalry_OR.pdf)
- Ihsanoglu, E. (2010). *The Islamic World in the New Century : The Organization of the Islamic Conference*. London: Husrt & Company.
- Jawan, S. N. (2013). Geopolitics of the Islam World and world leadership in the post-Cold War geopolitical developments. *Transcience*, 1-12.
- Johnson. (2010, Juni 29). *The Organization of the Islamic Conference*. Retrieved Februari 05, 2018, from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/organization-islamic-conference>
- Johnson, T. (2010, Juni 29). *The Organization of the Islamic Conference*. Retrieved Februari 01, 2018, from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/organization-islamic-conference>
- Jonge, J. D. (2012). *Rethinking Rational Choice Theory : A Companion on Rational and Moral Action*. New York: Palgrave Macmillan.

- Kechichian, J. A. (2016, Agustus 31). *Saudi foreign aid reaches new heights*. Retrieved Februari 01, 2018, from Gulf News: <http://gulfnews.com/opinion/thinkers/saudi-foreign-aid-reaches-new-heights-1.1888699>
- Matthiesen, T. (2012). A “Saudi Spring?”: The Shi’a Protest Movement in the Eastern Province 2011—2012. *Middle East Journal*, 628-630.
- Ngai, C. (2016, Januari 12). *Tumbling oil trades below \$30 a barrel for first time in 12 years*. Retrieved Februari 11, 2018, from The Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-global-oil/tumbling-oil-trades-below-30-a-barrel-for-first-time-in-12-years-idUSKCN0UQ02220160112>
- OIC. (2018, Februari 05). *OIC Charter*. Retrieved Februari 05, 2018, from OIC: [https://www.oic-oci.org/page/?p\\_id=53&p\\_ref=27&lan=en](https://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en)
- O’Toole, M. (2017, Agustus 15). *Is the time right for Saudi-Iran rapprochement?* Retrieved Februari 12, 2018, from Al-Jazeera: <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/time-saudi-iran-rapprochement-170815083034894.html>
- Patnistik, E. (2016, Januari 06). *Mengapa Iran dan Arab Saudi Bermusuhan ?* Retrieved Januari 10, 2018, from Kompas: <http://internasional.kompas.com/read/2016/01/06/09171261/Mengapa.Iran.dan.Arab.Saudi.Bermusuhan>.
- Paul Anand, P. K. (2009). *The Handbook of Rational and Social Choice*. New York: Oxford University Press.
- Rafael Witteck, T. A. (2013). *The Handbook of Rational Choice Social Research*. California: Stanford University.

- Rana, S. (2016, Maret 11). *Saudis to give Pakistan \$122m in aid*. Retrieved Februari 02, 2018, from The Express Tribune Pakistan: <https://tribune.com.pk/story/1063733/saudis-to-give-pakistan-122m-in-aid/>
- Reimann, J. (2016, Februari 05). *Saudi Arabia vs. Iran: Predominance in the Middle East*. Retrieved Februari 04, 2018, from Foreign Policy Journal: <https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/02/05/saudi-arabia-vs-iran-predominance-in-the-middle-east/>
- Samosir, H. A. (2016, Januari 05). *Sejarah Panjang Perselisihan Arab Saudi dan Iran*. Retrieved Januari 17, 2018, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120-102293/sejarah-panjang-perselisihan-arab-saudi-dan-iran/>
- Samosir, H. A. (2016, Januari 05). *Sejarah Panjang Perselisihan Arab Saudi dan Iran*. Retrieved Januari 10, 2018, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120-102293/sejarahpanjang-perselisihan-arab-saudi-dan-iran/>
- Samuel, K. L. (2013). *The OIC, the UN, and Counter-Terrorism Law-Making : Conflicting or Cooperative Legal Orders?* UK: Hart Publishing.
- Setyanti, C. A. (2016, Januari 05). *Jumlah Negara yang Putus Hubungan dengan Iran Semakin Banyak* . Retrieved Januari 16, 2018, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105051300-120-102163/jumlah-negara-yang-putus-hubungan-dengan-iran-semakin-banyak/>

- Shahab, A. &. (2017). Impacts of Saudi Hegemony on the Organization of Islamic Cooperation (OIC). *International Journal of Politics, Culture and Social*, 08.
- Shahryarifar, S. (2016). A Defence on the Prominence of Rational Actor Model within Foreign Policy Analysis. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 25-26.
- Spencer, R. (2015, Juli 14). *Israel and Saudi Arabia present united front over Iran deal*. Retrieved Februari 02, 2018, from The Telegraph: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/11739349/Israel-and-Saudi-Arabia-present-united-front-over-Iran-deal.html>
- Syed, J. E. (2016). *Faith-Based Violence and Deobandi Militancy in Pakistan*. UK: Palgrave Macmillan.
- Toumi, H. (2012, September 10). *Scholarship givento promote Islamic Studies*. Retrieved Februari 01, 2018, from Gulf News: <http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/scholarships-given-to-promote-islamic-studies-1.1072381>
- UN News Center . (2016, November 17). *UN and Organisation of Islamic Cooperation must cooperate on resolving conflicts, Security Council told*. Retrieved Februari 05, 2018, from UN News Center: [http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55590#.WnfTpXcQ\\_IV](http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55590#.WnfTpXcQ_IV)
- United State Institute of Peace. (2016, April 15). *Iran and Islamic Conference: Tensions at the Summit* . Retrieved Februari 05, 2018, from The Iran Primer: <http://iranprimer.usip.org/blog/2016/may/23/iran-and-islamic-conference-tensions-summit>

- White House. (2017, Mei 23). *Joint Statement Between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America*. Retrieved Februari 02, 2018, from The White House : <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-kingdom-saudi-arabia-united-states-america/>
- Zuhur, S. (2011). *Saudi Arabia*. Santa Barbara: ABC-CLIO.

